

**LAPORAN AKHIR**

**HIBAH BERSAING**



**HARMONISASI JARINGAN SOSIAL SEBAGAI FAKTOR  
PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PELAYANAN PUBLIK  
DI KABUPATEN BOALEMO**

**Tahun Kedua dari rencana Dua Tahun**

**Ketua Tim/Anggota**

Dr. Ismet Sulila, SE. M.Si (00180378002)

Drs. Rusli Isa, M.Si (0006076604)

Sainudin Latare, S.Pd., M.Si (0010087509)

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**TAHUN 2014**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Judul Kegiatan** : Harmonisasi Jaringan Sosial Sebagai Faktor Pendukung dan Penghambat Pelayanan Publik di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

**Peneliti / Pelaksana**  
Nama Lengkap : Dr. ISMET SULILA SE., M.Si  
NIDN : 0018037802  
Jabatan Fungsional :  
Program Studi : Administrasi Perkantoran  
Nomor HP : 085340024000  
Surel (e-mail) : ismet.sulila@gmail.com

**Anggota Peneliti (1)**  
Nama Lengkap : Drs RUSLI ISA M.Si  
NIDN : 0006076604  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

**Anggota Peneliti (2)**  
Nama Lengkap : SAINUDIN LATARE S.Pd., M.Si  
NIDN : 0010087509  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

**Institusi Mitra (jika ada)**  
Nama Institusi Mitra :  
Alamat :  
Penanggung Jawab :  
**Tahun Pelaksanaan** : Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun  
**Biaya Tahun Berjalan** : Rp. 40.000.000,00  
**Biaya Keschuruhan** : Rp. 80.000.000,00



Mengetahui  
Dekan FEB

*(Signature)*  
(Imran R. Hambali, S.Pd, SE, MSA )  
NIP/NIK 197008231999031001

Gorontalo, 12 - 11 - 2014,  
Ketua Peneliti,

*(Signature)*  
(Dr. ISMET SULILA SE., M.Si)  
NIP/NIK



Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian

*(Signature)*  
(Dr. Fitriyane Lihawa, M.Si)  
NIP/NIK 196912091993032001

## **ABSTRAK**

Kajian ini lahir berdasarkan situasi sosial masyarakat di Kabupaten Boalemo yang majemuk terdiri dari berbagai suku termasuk suku Gorontalo sebagai suku asli yang mendiami daerah ini. Harmonisasi jaringan sosial sebagai faktor pendukung dan penghambat pelayanan publik di Kabupaten Boalemo akan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengkaji secara mendalam dan menyeluruh terhadap tiga fokus utama, yaitu tentang bagaimana kondisi interaksi jaringan sosial masyarakat di Kabupaten Boalemo, faktor-faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat terbangunnya jaringan sosial yang kondusif di Kabupaten Boalemo. Penelitian ini akan dibagi menjadi dua tahapan dan akan dilaksanakan dalam jangka waktu dua tahun. Tahap pertama penelitian ini telah mengkaji secara mendalam dan menyeluruh tentang interaksi berbagai jaringan sosial di Kabupaten Boalemo serta berbagai faktor pendukung dan penghambat terbangunnya jaringan sosial yang kondusif, hasil yang ingin dicapai adalah pemetaan terhadap jaringan sosial beserta faktor pendukung dan penghambat terhadap terciptanya jaringan sosial yang kondusif. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang akan dilakukan mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Kata kunci : Model, Harmonisasi, Sosial

## **PRAKATA**

Syukur Alhamdulillah, peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya jualah sehingga tim peneliti dapat menyelesaikan laporan akhir penelitian tahun kedua ini. Kami menyadari bahwa dalam penelitian ini, berbagai pihak telah memberikan bantuan, maka selayaknyalah penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Tim Reviuer Proposal penelitian hibah Pendidikan Tinggi.
2. Rektor Universitas Negeri Gorontalo
3. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Gorontalo
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo
5. Pimpinan dan staf Badan Kesbangpol Kab. Boalemo
6. Bapak/Ibu pengurus organisasi sosial se Kabupaten Boalemo
7. Seluruh pihak yang telah membantu tim peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo yang telah bersedia membantu tim peneliti dalam kegiatan ini.

Akhirnya, mudah-mudahan hasil penelitian ini bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari lahirnya karya ilmiah yang lebih baik dan berguna untuk harmonisasi pembangunan di Kabupaten Boalemo. Amiiin....

Gorontalo, Oktober 2014

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Abstrak.....	iii
Prakata .....	iv
Daftar Isi .....	v
Daftar Gambar .....	vii
Daftar Lampiran .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Urgensi Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Kelompok-kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat .....	8
2.2 Pelayanan Publik .....	11
2.3 Hubungan antara jaringan sosial dan pelayanan publik .....	15
2.4 Studi Pendahuluan .....	16
<b>BAB III TUJUAN DAN MANFAAT .....</b>	<b>19</b>
3.1 Tujuan .....	19
3.2 Manfaat .....	19
<b>BAB IV METODE PENELITIAN .....</b>	<b>21</b>
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
5.1 Kajian Komprehensif Kelompok sosial dan jaringan sosial di Kabupaten Boalemo. ....	24
5.2 Kajian pemetaan seluruh kelompok sosial dan jaringan sosial di Kabupaten Boalemo .....	26

5.3 Kajian terhadap faktor pendukung dan penghambat	
Harmonisasi jaringan sosial di Kabupaten Boalemo .....	31
5.4 Model harmonisasi jaringan sosial di Kabupaten Boalemo .....	35
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....	44
7.1 Kesimpulan .....	44
7.2 Saran .....	44
DAFTAR PUSTAKA .....	46
LAMPIRAN :	
Instrumen/Pedoman Wawancara .....	47
Dokumentasi .....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Penelitian .....	23
----------	------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Instrumen/Pedoman Wawancara .....	47
Lampiran 3	Dokumentasi .....	53

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Paradigma baru penyelenggaraan pemerintah telah membawa konsekwensi yang luas bagi lembaga pemerintah di tingkat pusat hingga daerah. Hal ini tercermin dalam tekad penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih otonom dan terdesentralisasi, ketimbang dengan paradigma lama yang semuanya serba terpusat dan dibawah kendali langsung dari pemerintah pusat. Konsep desentralisasi secara populer diartikan sebagai pemberian/mendelegasikan wewenang dari atasan (pemilik wewenang) kepada bawahan (pelaksana). Sementara itu otonomi mengandung makna kemandirian. Mandiri dalam konteks ini adalah kebebasan untuk memilih dan menyelenggarakan pemerintah yang disertai dengan kemampuan. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah tersebut telah menjadikan pemerintah daerah sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tuntutan reformasi yang bergulir sejak tahun 1997, bersamaan dengan arus globalisasi yang memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perbaikan ekonomi, mendorong pemerintah untuk kembali memahami arti pentingnya suatu kualitas pelayanan serta pentingnya dilakukan perbaikan kualitas pelayanan. Pelayanan Publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan

dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya.

Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam keberadaannya sebagai salah satu daerah otonom menuju pemerintahan daerah yang mandiri berdasarkan semangat otonomi daerah melakukan pembenahan disemua lini pemerintahan termasuk dalam upaya terus meningkatkan efektifitas layanan public di daerah ini. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintahan Kabupaten Boalemo sebagaimana telah ditetapkan dalam pola dasar pembangunan daerah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2001 yang menjadi landasan berpijak dalam rangka melakukan pembangunan yang disusun melalui sector program unggulan yang terdiri dari: 1) pemberdayaan masyarakat, 2) peningkatan sumber daya manusia, 3) peningkatan derajat kesehatan masyarakat, 4) penunjang sector unggulan, 5) peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Implementasi kelima sektor unggulan di atas ternyata masih diperhadapkan pada kondisi tertentu sehingga belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari berbagai masalah yang dihadapi di daerah. Berbagai masalah yang masih dihadapi di daerah ini adalah sebagai berikut: 1) banyak wilayah yang masih tertinggal dalam pembangunan, 2) belum berkembangnya wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, 3) wilayah terpencil kondisinya masih terkebelakang. Oleh karena itu untuk mengefektifkan penanganan berbagai masalah di atas maka dikelompokkan menjadi lima aspek masalah, yaitu: 1) permasalahan berkaitan dengan pengembangan ekonomi local, 2) permasalahan

berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, 3) permasalahan berkaitan dengan kapasitas kelembagaan, 4) permasalahan berkaitan dengan keterisolasian, 5) permasalahan berkaitan dengan karakteristik daerah.

Dari berbagai kelompok masalah sebagaimana dijelaskan di atas, salah satu kelompok masalah yang menarik untuk dikaji adalah mengenai karakteristik daerah. Kabupaten Boalemo dikenal sebagai daerah dengan penduduk yang majemuk. Dalam survey jumlah penduduk yang diperoleh dari BPS tahun 2007, jumlah penduduk Kabupaten Boalemo adalah 109.868 jiwa, dengan kepadatan penduduk dalam wilayah seluas 2.510 Km<sup>2</sup> ini adalah 49 jiwa/km. Dalam komposisi etnis, pluralitas masyarakat Boalemo tercermin dari beragamnya suku dan bangsa yang menghuni wilayah ini, selain suku Gorontalo sendiri sebagai suku asli. Etnis lain yang didata adalah suku Jawa, Bugis, Bali, Bajo, Minahasa, Sangir dan keturunan Tionghoa, serta Arab. Wilayah ini juga masih terus bersedia menerima etnis lain untuk mendiami Boalemo dan bersama-sama melaksanakan pembangunan di daerah ini.

Secara geografis, sebaran suku atau etnis di daerah ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Suku Gorontalo tersebar di semua Kecamatan
2. Suku Etnis Minahasa berada di Kaaruyan dan Tabulo
3. Suku Bugis-Makassar di beberapa kecamatan
4. Suku Etnis Sangihe Talaud, di Kecamatan Karangetan
5. Suku Etnis Jawa Tondano di Rojonegoro, Paguyaman, Salilama dan Kec. Mananggu

6. Suku Etnis Bajo di Desa Bajo Kec. Tilamuta
7. Suku Etnis Jawa-Madura, Mataram serta Bali berada di Kec. Wonosari.
8. Suku Etnis Tionghoa dan Arab, di beberapa kecamatan.

Ditinjau dari perspektif keamanan dan ketertiban, kelompok-kelompok dalam masyarakat merupakan komponen utama dalam menjaga ketertiban hukum, tertib sosial, tertib ekonomi, yang nantinya menjadi faktor utama dalam penyangga keamanan setempat. Aman dapat berarti masyarakat dapat terbebas dari ancaman baik tindakan kriminal maupun ancaman lainnya. Selain itu, aman mencerminkan keadaan tenteram, tidak ada rasa takut dan khawatir. Sedangkan damai mengandung arti tidak ada konflik, kerusuhan, tidak bermusuhan serta hidup rukun hingga dapat mewujudkan keharmonisan yang membawa pada lancarnya agenda pembangunan. Masyarakat Boalemo sendiri tidak memiliki budaya kekerasan yang selalu menghadapi konflik antar komponennya. Ketegangan dalam hubungan memang terjadi bila menyikapi suatu kebijakan, tapi pihak eksekutif selalu berkontak dengan komponen masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan dan demikian pula sebaliknya.

Dari jumlah penduduk yang multi etnis dan situasi sosial sebagaimana dijelaskan di atas merupakan gambaran awal situasi yang berada di Kabupaten Boalemo. Namun demikian hal ini jelas belum merupakan jaminan bagi efektifitas berbagai tugas pelayanan publik di daerah ini. Hal ini berarti bahwa dibutuhkan kajian yang mendalam untuk terus menjaga keutuhan jaringan sosial baik dimasa sekarang dan masa yang akan datang, sehingga berbagai tugas pemerintah dalam layanan publik dapat dilaksanakan.

Dalam mewujudkan Boalemo Bertasbih (Beriman, Taqwa, Sehat, Bersih, Indah dan Harmonis), bupati memberi ruang gerak terhadap apa yang disebut *civil society* (masyarakat madani), dimana individu dan kelompok dalam masyarakat dapat saling berinteraksi dengan semangat toleransi. Dalam ruang tersebut, masyarakat dapat melakukan partisipasi dalam pembentukan kebijakan publik dalam suatu negara. Ruang tersebut terletak di antara negara di satu pihak dan masyarakat di pihak lain, dan dalam ruang itu terdapat asosiasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun sebuah hubungan jaringan sosial yang harmonis antara sesama asosiasi dan pemerintah setempat. Oleh pemerintah Kabupaten Boalemo asosiasi yang bisa dibentuk tersebut dapat dibentuk berdasarkan ikatan keluarga, keyakinan, kepentingan, ikatan profesi, LSM dan sebagainya.

Berdasarkan penelusuran awal yang dilakukan diperoleh data tentang sejumlah jaringan sosial yang dibentuk dalam asosiasi warga (masyarakat madani) di Kabupaten Boalemo yang muncul di media masa berjumlah 33 (tiga puluh tiga) asosiasi warga. Jumlah ini tentunya menunjukkan banyaknya jaringan sosial yang ada di Kabupaten Boalemo. Jumlah ini jika tidak dikelola dengan baik maka dapat berpotensi mengarah pada hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu calon peneliti tertarik untuk melakukan kajian terhadap harmonisasi jaringan sosial sebagai faktor pendukung dan penghambat layanan publik di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dijelaskan di atas, maka kajian ini akan difokuskan pada beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

- 1). Bagaimana kajian komprehensif kelompok social dan jaringan social di Kabupaten Boalemo?
- 2). Bagaimana pemetaan seluruh kelompok social dan jaringan social di Kabupaten Boalemo?
- 3). Bagaimanakah kajian terhadap factor pendukung dan penghambat harmonisasi jaringan social di Kabupaten Boalemo?
- 4). Bagaimanakah model harmonisasi jaringan social di Kabupaten Boalemo?

## **1.3 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1). Melaksanakan kajian ilmiah yang mendalam terhadap interaksi kelompok sosial beserta jaringannya di Kabupaten Boalemo.
- 2). Melaksanakan kajian ilmiah yang mendalam terhadap berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat terbangunnya jaringan sosial yang kondusif di Kabupaten Boalemo.
- 3). Melaksanakan kajian ilmiah yang mendalam terhadap model harmonisasi jaringan sosial dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Boalemo

## **1.4 Urgensi Penelitian**

Dalam mewujudkan Kabupaten Boalemo Bertasbih (Beriman, Taqwa, Sehat, Bersih, Indah dan Harmonis), maka peran serta masyarakat utamanya dalam menciptakan situasi sosial yang aman damai merupakan syarat utama untuk terlaksananya berbagai program pembangunan termasuk pelayanan publik. Dalam perspektif pemerintahan Provinsi Gorontalo terdiri dari 6 (enam) daerah kabupaten/Kota, termasuk didalamnya adalah Kabupaten Boalemo. Namun, secara sosial, kondisi masyarakat Boalemo yang majemuk merupakan ciri khas yang membedakan daerah ini dengan beberapa daerah lainnya di wilayah Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan kondisi majemuk dari berbagai etnis sebagaimana dijelaskan sebelumnya tentunya ini merupakan tantangan bersama untuk dapat terus menjaga ikatan persaudaraan dan kerukunan, sehingga situasi yang aman dan damai dapat terus terpelihara bahkan terus ditingkatkan. Oleh karena itu untuk mewujudkan maksud di atas maka dibutuhkan kajian mendalam harmonisasi jaringan sosial sebagai faktor-faktor pendukung dan penghambat pelayanan publik di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kelompok-kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat.**

Dalam konteks sosial, sejak dilahirkan manusia sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya dan keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya (Basrowi:2005:49). Selanjutnya untuk dapat menyesuaikan diri dengan kedua lingkungan tersebut di atas, manusia menggunakan pikiran, perasaan dan kehendaknya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Soekanto (2002:115) juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat sebuah kelompok sosial yang dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu 1) setiap anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan, 2) ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota lainnya, 3) ada suatu faktor yang dimiliki bersama, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat, 4) berstruktur, berkaidah dan mempunyai pola perilaku, 5) bersistem dan berproses.

Dalam konteks tipe-tipe kelompok sosial, sebagaimana dikemukakan George Simmel, mengambil ukuran besar kecilnya jumlah anggota kelompok, bagaimana individu mempengaruhi kelompoknya serta interaksi sosial dalam kelompok tersebut. Dalam analisisnya mengenai kelompok sosial, George Simmel memulai dengan bentuk terkecil yang terdiri dari satu orang sebagai fokus hubungan sosial, yang dinamakannya *monad*. Kemudian Monad dikembangkan dengan meneliti kelompok kecil lainnya. Disamping itu,

sebagai perbandingan ditelaahnya kelompok-kelompok besar (Basrowi: 2005:50). Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa ukuran lainnya adalah kepentingan dan wilayah. Suatu komunitas misalnya, merupakan kelompok-kelompok atau kesatuan-kesatuan atas dasar wilayah yang tidak mempunyai kepentingan yang khusus/tertentu. Asosiasi (association) sebagai suatu perbandingan justru dibentuk untuk memenuhi kepentingan tertentu. Dalam konteks ini sudah tentu anggota-anggota komunitas maupun asosiasi tersebut setidaknya sadar akan adanya kepentingan-kepentingan bersama, walaupun tidak dikhususkan secara terinci atau dijabarkan lebih lanjut. Selanjutnya juga dapat dijumpai klasifikasi atas dasar ukuran derajat organisasi. Kelompok-kelompok terdiri dari kelompok yang terorganisasi dengan baik, seperti negara, sampai pada kelompok yang hampir tak terorganisasi.

Disamping kelompok-kelompok sosial sebagaimana dijelaskan di atas, dalam konteks kelompok sosial dikenal juga adanya Paguyuban menurut Ferdinand Tonies dan Charles P. Loomis (dalam Basrowi:54) paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama, dimana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dalam hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan. Kehidupan tersebut dinamakan juga bersifat nyata dan organis, sebagaimana dapat diumpamakan dengan organ tubuh manusia atau hewan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Paguyuban terutama dapat dijumpai dalam keluarga kelompok kekerabatan, rukun tetangga dan sebagainya. Suatu paguyuban mempunyai beberapa ciri pokok berikut, yaitu 1) intimate,

hubungan meneluruh yang mesra, 2) private, hubungan yang bersifat pribadi, 3) exclusive, hubungan tersebut hanyalah untuk “kita” saja dan tidak untuk orang-orang diluar “kita”.

Dalam konteks kelompok sosial sebagaimana dijelaskan di atas kelompok sosial yang ada di Kabupaten Boalemo juga telah terbentuk. Namun berbagai kelompok tersebut lebih nampak terlihat dalam bentuk asosiasi warga yang terbentuk dalam berbagai bentuk organisasi masyarakat, dimana data awal yang diperoleh sampai dengan tahun 2007 kelompok-kelompok sosial ini telah berjumlah 33 kelompok sosial. Kelompok sosial ini jelas memiliki jaringan dan basis masa yang jumlahnya bervariasi. Dalam kondisi ini, hal yang menarik calon peneliti adalah kelompok-kelompok ini dibentuk diantaranya dengan maksud memperjuangkan aspirasi dan tujuan anggota kelompok yang bersangkutan. Disisi lain dalam mewujudkan “Boalemo Bertasbih” pemerintah memberi ruang gerak terhadap *civil society* (masyarakat madani), dimana individu dan kelompok dalam masyarakat dapat saling berinteraksi dengan semangat toleransi. Dalam ruang tersebut masyarakat dapat melakukan partisipasi dalam pembentukan kebijakan publik. Oleh karena itu tantangan yang perlu diperhatikan dalam kondisi ini adalah bagaimana jaringan sosial yang ada pada kelompok sosial tersebut dapat diharmonisasi sehingga dapat turut serta berpartisipasi dalam meningkatkan layanan publik di Kabupaten Boalemo.

## 2.2 Pelayanan Publik (*Public Service*)

Di Indonesia, konsepsi pelayanan administrasi pemerintahan seringkali dipergunakan secara bersama-sama atau dipakai sebagai sinonim dari konsepsi pelayanan perijinan dan pelayanan umum, serta pelayanan publik. Keempat istilah ini dipakai sebagai terjemahan dari *public service*. Hal ini dapat dilihat dalam dokumen-dokumen pemerintah sebagaimana dipakai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Dalam kajian ini, administrasi pemerintahan disejajarkan atau disamakan pengertiannya dan penggunaannya sebagai sinonim dari pelayanan perizinan, yang merupakan terjemahan *administrative service*. Sedangkan pelayanan umum lebih sesuai jika dipakai untuk menerjemahkan konsep *public service*. Istilah pelayanan umum ini dapat disejajarkan atau dipadankan dengan istilah pelayanan publik.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 yang kemudian disempurnakan dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 mendefinisikan pelayanan umum sebagai berikut :

”Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah Dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Keputusan MENPAN No. 63/2003).

Mengikuti definisi di atas, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan

dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pelayanan administrasi pemerintahan atau pelayanan perizinan dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bentuk produk pelayanannya adalah ijin atau warkat.

Publik adalah masyarakat umum itu sendiri, yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator tetapi juga sekaligus kadang-kadang bertindak sebagai penguasa dalam pengaturan hukum tata negaranya. (Kencana Inu, 1999). Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. (Widodo Joko, 2001). Sedangkan Pelayanan Umum oleh Lembaga Administrasi Negara (1998) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara/daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap manusia memerlukan alat-alat yang dapat mendukung kehidupannya. Alat-alat tersebut dapat berupa barang dan jasa bahkan kepedulian terhadap sesama maupun lingkungan yang kesemuanya disebutkan kebutuhan. Ndraha dengan mengutip pendapat *Van Poelje* mengatakan: bahwa kebutuhan manusia sebagai jamannya sebagai kebahagiaan lahir batin. Lebih lanjut dinyatakan bahwa produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat ada yang dapat diperoleh melalui mekanisme pasar, ada pula yang tidak. Yang tidak dapat diperoleh melalui mekanisme pasar diantaranya layanan civil dan jasa publik, kecuali setelah diprivatisasikan. Atau dengan kata lain berbeda dengan layanan civil yang tidak dapat dijual beli dan dimonopoli oleh pemerintah, maka jasa publik (yang proses produksinya disebut pelayanan publik), dilihat dari sifat-sifatnya dapat diperoleh melalui mekanisme pasar namun di bawah control pemerintah. Penanganan terhadap jasa publik (produk yang menyangkut hajat hidup orang banyak) dapat diprivatisasikan tetapi layanan civil tidak.

Konsepsi pelayanan administrasi pemerintahan sering kali dipergunakan secara bersama-sama atau dipakai sebagai sinonim dari konsepsi pelayanan perijinan dan pelayanan umum, serta pelayanan publik. Keempat istilah tersebut dipakai sebagai terjemahan dari *Public Service*. Sedangkan menurut Ratminto (2006:4) menjelaskan bahwa pelayanan umum sesuai jika dipakai untuk menterjemahkan konsep *public service*, Istilah pelayanan umum dapat disejajarkan atau dipadankan dengan istilah pelayanan publik. Dalam Kep Menpan No. 63 Tahun 2003 dijelaskan pelayanan umum sebagai segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di

lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Publik adalah masyarakat umum itu sendiri, yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator tetapi juga sekaligus kadang-kadang bertindak sebagai penguasa dalam pengaturan hukum tata negaranya (Kencana Inu, 1999). Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. (Widodo Joko, 2001). Sedangkan Pelayanan Umum oleh Lembaga Administrasi Negara (1998) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah dan di lingkungan badan usaha milik negara/daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengikuti berbagai uraian tersebut diatas, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, daerah, BUMN atau BUMD, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pelayanan administrasi pemerintahan atau pelayanan perizinan dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan instansi pemerintah di pusat, di daerah, BUMN atau BUMD, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bentuk produk pelayanannya adalah ijin atau warkat.

### **2.3 Hubungan antara Jaringan Sosial dan Pelayanan Publik**

Dalam konteks penelitian ini jaringan sosial dipandang sebagai hal pokok yang turut menentukan dan berkontribusi dalam pelayanan publik di suatu daerah. Hal ini dapat dilandasi dengan argumentasi mendasar bahwa satu lingkungan sosial di daerah akan mampu menyelenggarakan pemerintahan yang baik apabila didukung oleh situasi sosial masyarakat yang aman dan kondusif. Dalam survey yang dilakukan oleh BPS setempat diperoleh data jumlah penduduk 109.868 jiwa yang terdiri dari beberapa suku atau etnis (Shodiqin Nursa:2007:70). Selain itu pula dinamika masyarakat yang kompleks dan plural membentuk kelompok-kelompok sosial, dimana di daerah ini dikenal dengan nama masyarakat madani (civil society). Data perkembangan sosial terbaru menunjukkan 33 kelompok sosial yang telah terbentuk. Banyaknya kelompok sosial ini turut memberikan warna tersendiri dalam partisipasi pembangunan dan pelayanan publik di daerah ini. Tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana kemampuan daerah dalam membangun sinergitas antara sesama kelompok sosial sehingga mampu memberikan kontribusi positif dalam pembangunan. Bila mengacu pada kasus di beberapa daerah lain, kelompok sosial yang tidak memiliki hubungan yang

kondusif justru akan membawa daerah tersebut dalam situasi perpecahan yang tidak diinginkan, akibatnya pembangunan dan pelayanan publik di daerah berjalan dengan lamban bahkan semakin jauh dari keberhasilan. Dengan kata lain bahwa harmonisasi jaringan sosial di daerah harus mampu dibangun dengan lebih baik karena hal tersebut dapat dijadikan sebagai modal dasar dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

#### **2.4 Studi Pendahuluan**

Sebagai studi pendahuluan dalam kegiatan penelitian ini maka telah diperoleh beberapa data awal yang dapat mengantarkan calon peneliti dalam merumuskan dan menyusun rencana penelitian ini. Data awal yang telah diperoleh diantaranya meliputi kondisi geografis, situasi sosial dan ekonomi, berbagai kelompok jaringan sosial di daerah, dan arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan daerah, yang selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut.

##### **1). Kondisi Geografis**

Kabupaten Boalemo secara administratif berada pada wilayah Provinsi Gorontalo. Sebelah utara kabupaten Boalemo berbatasan dengan Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo dan Buol Toli-toli Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelah timur daerah ini berbatasan dengan Kabupaten Boliyohuto Kabupaten Gorontalo, sedangkan sebelah barat, kabupaten Boalemo berbatasan dengan Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, dan sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini Gorontalo. Dalam skala luas wilayah, kabupaten Boalemo mencakup 2.510,4 Km<sup>2</sup> atau 20,55% dari luas Provinsi Gorontalo. Dalam cakupan wilayah administratif,

Kabupaten Boalemo terdiri dari 7 Kecamatan, 5 wilayah pesisir (Tilamuta, paguyaman pantai, dulupi, botumoito dan mananggu, sementara 2 daratan adalah kecamatan paguyaman dan kecamatan wonosari. Dalam setiap kecamatan, wilayah administratif dibawahnya yang berfungsi melancarkan efektifitas pemerintahan daerah, maka dibagi lagi menjadi desa, dusun atau unit administratif terkecil yakni RW dan RT. Adapun jumlah seluruh desa adalah 82 Desa, yang didiami oleh 109.868 jiwa.

## 2). Komposisi Etnis Masyarakat.

Dalam komposisi etnis, pluralitas masyarakat Boalemo tercermin dari beragamnya suku dan bahasa yang menghuni wilayah ini selain suku Gorontalo sendiri sebagai suku asli. Etnis lain yang didata adalah suku jawa, bugis, bali, bajo, minahasa, sangir talaud dan keturunan tionghoa serta arab yang tersebar pada berbagai wilayah kecamatan dan desa di Kabupaten Boalemo. Disamping itu pula wilayah Boalemo menerima etnis lain dalam rangka pelaksanaan program transmigrasi. Disamping itu pula data awal di lapangan juga menunjukkan bahwa pada situasi sosial masyarakat Boalemo telah telah membentuk kelompok-kelompok sosial/asosiasi warga masyarakat yang sampai dengan saat ini telah mencapai 33 (tiga puluh tiga) kelompok. Bergagai kelompok sosial ini jelas memiliki misi tertentu untuk memperjuangkan aspirasi dari anggota kelompok yang dinaunginya.

## 3). Arah kebijakan Pembangunan

Dalam membangun daerah Boalemo, telah ditetapkan pola dasar pembangunan daerah dengan Perda No. 2 Tahun 2001 yang menjadi landasan

berpijak dalam rangka melaksanakan pembangunan, yang meliputi beberapa sektor, yaitu 1) Sektor Pertanian, 2) sektor perikanan dan kelautan, 3) sektor kehutanan, 4) sektor pariwisata, 5) sektor pertambangan. Disamping itu pula sektor unggulan tersebut di atas dalam pelaksanaannya ditunjang oleh lima program unggulan yang meliputi 1) pemberdayaan masyarakat, 2) peningkatan sumber daya manusia, 3) peningkatan derajat kesehatan masyarakat, 4) penunjang sektor unggulan dan 5) peningkatan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan studi pendahuluan dan hasil yang telah dicapai sebagaimana dijelaskan di atas, maka calon peneliti menetapkan rancangan penelitian melalui beberapa tahapan kajian penelitian yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1). Melakukan kajian yang komprehensif terhadap interaksi jaringan sosial di Kabupaten Boalemo.
- 2). Melakukan kajian yang komprehensif terhadap faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat terbangunnya jaringan sosial yang kondusif dalam rangka pelayanan publik di Kabupaten Boalemo.
- 3). Melakukan kajian yang komprehensif tentang harmonisasi jaringan sosial sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Boalemo.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN MANFAAT**

#### **3.1 Tujuan.**

Dalam melaksanakan penelitian ini tujuan yang telah dicapai adalah adanya hasil kajian terhadap jaringan sosial di daerah beserta faktor pendukung dan penghambat atas terwujudnya jaringan sosial yang kondusif dalam pelayanan publik, yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Melakukan kajian awal tentang berbagai kelompok sosial atau jaringan sosial di Kabupaten Boalemo.
2. Melaksanakan kajian Terhadap Jaringan Kelompok sosial di daerah
3. Melakukan kajian berbagai faktor yang dapat mendukung dan menghambat harmonisasi jaringan sosial di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

#### **3.2 Manfaat.**

Dengan tujuan penelitian sebagaimana diuraikan di atas, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Dengan terungkapnya berbagai jaringan sosial dan berbagai kepentingannya maka selanjutnya dapat diidentifikasi berbagai tujuan dan latar belakang pembentukan jaringan kelompok sosial di daerah ini dalam wilayah terkecil yaitu kecamatan, sehingga pengelompokan kepentingan sosial pun selanjutnya dapat diarahkan dan dikontrol melalui konsep harmonisasi, sehingga berbagai potensi yang dapat memicu perbedaan pandangan dapat dihindari.

2. Melaksanakan kajian Terhadap Jaringan Kelompok sosial di daerah
3. Dengan mengetahui berbagai faktor yang dapat mendukung harmonisasi jaringan sosial, kita dapat melakukan kajian lebih lanjut, bagaimana berbagai faktor pendukung tersebut dapat terus dipertahankan, bahkan dapat terus ditingkatkan pada masa yang akan datang, sebagai faktor-faktor yang memperkuat harmonisasi jaringan sosial di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Dengan mengetahui berbagai faktor yang dapat menghambat harmonisasi jaringan sosial, kita dapat melakukan kajian lebih lanjut, bagaimana faktor penghambat dapat diminimalisir dan dicarikan solusi terbaik bersama kelompok sosial dan pemerintah setempat.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

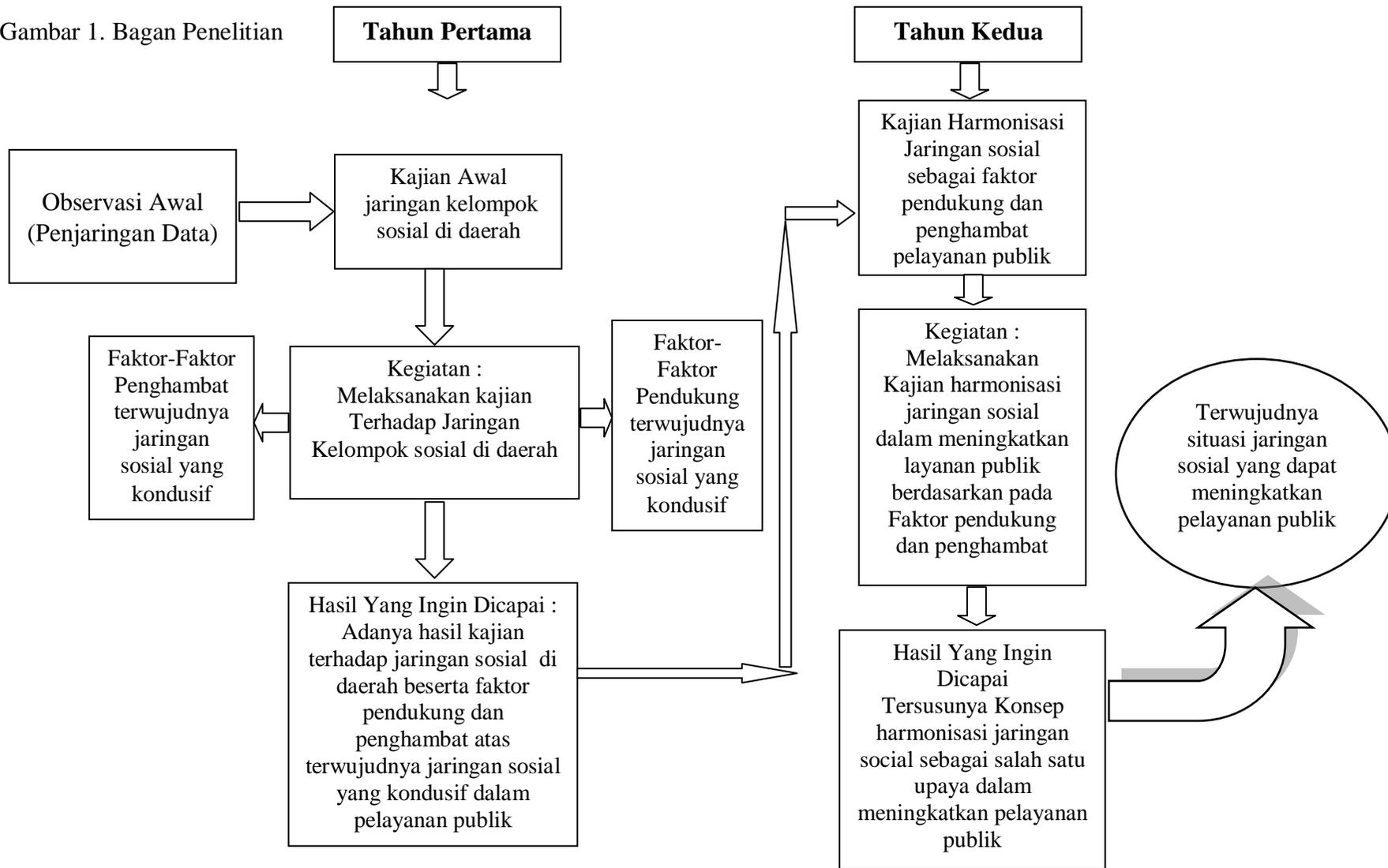
Kajian penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan maksud ingin melakukan kajian secara mendalam dan komprehensif terhadap harmonisasi jaringan sosial sebagai faktor pendukung dan penghambat pelayanan publik di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Prosedur penelitian ini akan dilakukan mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sanafiah Faisal (2005:256). Disamping itu pula, untuk memperdalam hasil kajian, pada setiap tahapan penelitian ini akan dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan seluruh pihak terkait. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi positif dalam konteks melakukan harmonisasi terhadap berbagai jaringan sosial yang ada di Kabupaten Boalemo sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan publik.

Kegiatan awal yang akan dilaksanakan adalah melakukan pemantapan proposal kegiatan penelitian dan melakukan observasi dan koleksi data awal di lapangan, yang berkaitan dengan fokus dan sub fokus kajian harmonisasi jaringan sosial sebagai faktor pendukung dan penghambat pelayanan publik di Kabupaten Boalemo. Hasil yang diharapkan adalah tersedianya data awal yang dapat memperjelas kegiatan penelitian yang difokuskan pada Pemahaman secara mendalam mengenai konsep harmonisasi sosial yang akan dilaksanakan. Tahap selanjutnya adalah kajian terhadap berbagai faktor pendukung maupun penghambat terbangunnya jaringan sosial yang kondusif di daerah berdasarkan

hasil kajian pada tahap pertama. Hasil yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya rancangan harmonisasi jaringan sosial berdasarkan faktor pendukung dan penghambat yang ada di daerah ini sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan publik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka bagan kajian penelitian harmonisasi jaringan sosial sebagai faktor pendukung dan penghambat pelayanan publik dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1. Bagan Penelitian



## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Setelah penelitian dilaksanakan maka hasil-hasil yang telah dicapai pada tahun pertama ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **5.1 Kajian Komprehensif kelompok sosial dan jaringan sosial di Kabupaten Boalemo.**

Perkembangan sebuah daerah salah satunya ditunjukkan oleh banyaknya aktifitas masyarakat dalam upaya terus meningkatkan kesejahteraannya masing-masing. Ditengah banyaknya kepentingan yang harus diperjuangkan, maka di daerah ini telah terbentuk sejumlah kelompok sosial ataupun jaringan sosial, dimana masing-masing kelompok sosial ini memiliki tujuan akan pembentukannya. Salah satu tujuan yang ingin dicapai tentu adalah memperjuangkan aspirasi kepentingan kelompok masing-masing, ataupun untuk mengungkapkan berbagai kritik dan saran kepada penyelenggara pemerintahan.

Ditinjau dari banyaknya jumlah kelompok sosial ataupun jaringan sosial di Kabupaten Boalemo sampai dengan tahun 2012 berjumlah 52 (lima puluh dua) kelompok sosial. Jumlah ini tersebar di beberapa wilayah kecamatan, yaitu Tilamuta, Paguyaman, Wonosari, Mananggu, Paguyaman Pantai, Wonosari, Botumoito dan Dulupi. Sedangkan bila ditinjau dari bidang kegiatan yang dilaksanakan meliputi ekonomi informal, keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan. Bila dilihat dari bentuk organisasi yang

dibentuk di wilayah ini yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kepemudaan, dan organisasi kemasyarakatan.

Dalam menjalankan misi organisasi, sebagian besar jaringan sosial memperjuangkan aspirasi mereka melalui dan atas nama organisasi tempat mereka berkumpul. Adapun aspirasi yang seringkali disampaikan adalah menyangkut kritikan terhadap jalannya pemerintahan di daerah, memperjuangkan berbagai program pembangunan di wilayah desa/kecamatan masing-masing, pengajuan kegiatan di wilayah desa/kecamatan baik kegiatan sosial maupun kegiatan keagamaan, dan tuntutan terhadap perhatian pemerintah terhadap perbaikan dan peningkatan kehidupan masyarakat di masing-masing wilayah.

Jika dilihat dari aspirasi yang disampaikan di atas sifatnya lebih bersifat normatif, yaitu memperjuangkan kepentingan anggota kelompoknya dan masyarakat tempat dimana organisasi/kelompok sosial ini berada. Hal ini dilakukan dengan harapan penyampaian berbagai aspirasi dan kepentingan melalui organisasi dirasakan lebih mendapatkan perhatian daripada disampaikan secara individu, oleh karena penyampaian secara kelompok berdasarkan representatif dari masyarakat yang ada dalam wilayah tersebut. Melihat kondisi ini maka tidaklah heran perkembangan organisasi/kelompok sosial di daerah ini terus berkembang, bahkan sampai pada terbentuknya kelompok sosial di beberapa wilayah, yang mewakili wilayah tersebut. Salah satu hal yang menarik adalah dalam satu wilayah kecamatan dimana terdapat

beberapa suku yang mendiami wilayah tersebut dan membentuk solidaritas tersendiri.

Dalam menjalankan aktifitasnya kelompok sosial ini memiliki kerjasama dan hubungan sosial yang akrab dan bersahaja dengan kelompok sosial yang lain dalam hal kegiatan sosial kemasayakatan. Sebagai contoh apabila satu kelompok sosial mengadakan kegiatan di salah satu desa, maka penyelenggara kegiatan tersebut mengundang kelompok sosial lainnya untuk bersama-sama terjun atau terlibat dalam menyelesaikan kegiatan tersebut. Selanjutnya kelompok yang diundang pun secara sukarela datang membantu kegiatan tersebut hingga sukses. Hal ini menunjukkan bahwa solidaritas antar kelompok sosial di wilayah ini tetap terjaga dengan baik dan tidak mengarah pada hal-hal yang dapat memecah persatuan dan kerjasama anggota kelompok dan masyarakat yang ada di dalamnya.

## **5.2 Kajian pemetaan seluruh kelompok sosial dan jaringan sosial di Kabupaten Boalemo**

Pemetaan terhadap kelompok sosial dan jaringan sosial di Kabupaten Boalemo perlu dilakukan untuk memperjelas berbagai aktifitas sosial yang dilakukan. Adapun pemetaan terhadap kelompok sosial berdasarkan aktifitas yang dilakukan dapat ditinjau dari beberapa hal sebagai berikut:

### 1) Ekonomi informal

Bentuk kegiatan yang dilakukan lebih mengarah pada upaya-upaya peningkatan ekonomi di tingkat masyarakat yang disuarakan kepada pemerintah daerah. Peningkatan ekonomi dilakukan melalui usaha memaksimalkan potensi yang dimiliki di masing-masing wilayah

tempat kelompok sosial ini dibentuk. Hal ini disuarakan oleh karena pemberdayaan masyarakat terhadap potensi yang dimiliki belum sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu melalui kelompok ini berbagai program dan rencana kerja diusulkan kepada pemerintah daerah dengan harapan dapat ditindaklanjuti.

## 2) Keagamaan

Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan keagamaan dengan tujuan meningkatkan aktifitas keagamaan di wilayah Kab. Boalemo, dengan tetap terjaga kerukunan antar sesama umat beragama. Kelompok sosial ini dibentuk untuk memperkuat basis anggotanya dalam menjalankan aktifitas keagamaan, sehingga dalam kegiatannya lebih terarah dan dapat memberikan manfaat bagi anggotanya dan masyarakat sekitarnya. Hal menarik yang ditemui di lapangan adalah berbagai organisasi keagamaan yang terbentuk di wilayah ini telah menunjukkan solidaritas, baik antar sesama pemeluk agama maupun antara pemeluk agama yang lain. Kondisi ini terlihat di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Boalemo, yaitu Kecamatan Wonosari, dimana pada wilayah ini didiami oleh penduduk yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Perbedaan tersebut bagi masyarakat bukanlah satu penghalang untuk hidup rukun dan damai dalam satu wilayah yang sama.

### 3) Sosial Kemasyarakatan

Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakili untuk mendapatkan perhatian pemerintah setempat, baik dalam hal pembangunan daerah, peningkatan ekonomi masyarakat dan perhatian terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam wilayah tersebut. Dalam memperjuangkan aspirasinya, kelompok sosial ini menganggap bahwa perhatian pemerintah terhadap wilayahnya belum sebagaimana yang diharapkan, baik dalam ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu sosial ini terus menyuarakan dan mendesak pemerintah untuk segera melakukan memprioritaskan pembangunan di desa. Berbagai aspirasi dan kritikan terus disampaikan melalui kelompok sosial ini hingga mendapatkan jawaban positif dari pemerintah.

### 4) Kesehatan

Pembentukan kelompok ini didasari pada pentingnya memperjuangkan aspirasi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat pada taraf minimal. Pembentukan kelompok sosial ini menurut masyarakat setempat dianggap penting karena melalui kelompok ini berbagai aspirasi di tingkat paling bawah dapat disampaikan dan disalurkan secara resmi kepada pemerintah. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah aktifitas dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat di seluruh wilayah Kab. Boalemo melalui penyampaian aspirasi, program kegiatan yang dapat ditindaklanjuti oleh kelompok

sosial dengan dukungan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam wilayah ini. Aspirasi yang disampaikan lebih pada beberapa hal, misalnya pemenuhan air bersih bagi keluarga, layanan kesehatan gratis, jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kegiatan yang mengarah pada kesehatan lainnya. Menurut pandangan masyarakat anggota kelompok ini dijelaskan bahwa perhatian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat adalah hal yang mutlak, karena kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu menurut pengurus kelompok ini bahwa keberadaan berbagai kelompok sosial yang memperjuangkan aspirasi pembangunan bidang kesehatan akan terus aktif dalam rangka untuk menjamin adanya program dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat di wilayah ini.

#### 5) Seni

Pembentukan kelompok-kelompok sosial dalam bidang ini didasari pada pandangan bahwa seni adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai daerah adat Gorontalo, termasuk di dalamnya Kabupaten Boalemo memiliki kesenian khas tersendiri yang perlu terus dibina untuk memperkaya seni dan budaya di daerah ini. Menurut pandangan pengurus kelompok sosial ini menjalskan bahwa aspirasi yang kami sampaikan pada pemerintah untuk pembinaan seni juga dilandasi pemikiran bahwa seni dan budaya yang ada di wilayah ini perlu diwariskan pada generasi muda sebagai generasi penerus. Apabila hal ini tidak dilakukan maka seni dan

budaya yang sudah terbangun selama ini akan hilang dan akan menghilangkan ciri daerah ini sebagai daerah seni dan budaya. Kabupaten Boalemo sendiri banyak memiliki karya seni dan budaya yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari seni dan budaya secara nasional. Oleh karena itu pembentukan kelompok sosial ini ditujukan untuk terus memperjuangkan aspirasi agar supaya pemerintah memberikan perhatian untuk terus membina seni dan budaya di daerah ini. adapun bentuk kegiatan yang dilakukan adalah aktifitas pembinaan dan peningkatan terhadap aktifitas kesenian di wilayah Boalemo, termasuk seni tradisional yang dianggap sebagai salah satu hal penting dalam membangun ikatan persaudaraan di wilayah Boalemo.

#### 6) Sosial dan budaya

Latar belakang terbentuknya kelompok sosial dan budaya di daerah ini berawal dari kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten Boalemo yang majemuk terdiri dari beberapa suku yang mendiami wilayah ini. Namun kelompok sosial yang dibentuk tidak berdasarkan suku, tetapi berdasarkan wilayah yang terdiri dari beberapa suku. Oleh karena itu kepentingan yang disuarakan pun adalah kepentingan bersama di wilayah tersebut. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan aktifitas sosial dan budaya di wilayah Boalemo melalui berbagai kegiatan sosial baik dalam wilayah desa/kecamatan maupun antara wilayah yang satu dan wilayah lainnya dalam daerah Kab.

Boalemo. Hal ini dilakukan melalui aktifitas kegiatan sosial sebagai salah satu upaya untuk memperkuat tali silaturahmi untuk menjaga persatuan dan kesatuan di wilayah ini. Kondisi tersebut telah terwujud selama ini melalui berbagai kegiatan yang juga mendapat dukungan baik dari pemerintah desa, kecamatan maupun pemerintah Kabupaten Boalemo.

### **5.3 Kajian terhadap faktor pendukung dan penghambat harmonisasi jaringan sosial di Kabupaten Boalemo**

Banyak jumlah penduduk yang mendiami kabupaten Boalemo yang terdiri dari berbagai etnis menuntut kepekaan pemerintah dalam memberikan perhatian, dalam upaya terus meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayah Kabupaten Boalemo. Disisi lain keinginan masyarakat Boalemo yang terus berkembang mengharapkan adanya percepatan pembangunan di berbagai wilayah kecamatan. Untuk dapat melakukan hal tersebut, maka salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka menyuarakan aspirasi masyarakat maka mereka membentuk kelompok-kelompok sosial untuk dapat memperjuangkan ataupun menyuarakan aspirasi di berbagai kalangan masyarakat. Harapannya adalah dengan terbentuknya kelompok sosial yang menyuarakan aspirasi secara resmi akan mendapatkan perhatian dan respon yang cepat dari pemerintah dalam hal tindak lanjutnya. Oleh karena banyaknya kelompok sosial yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula, maka hal yang perlu diperhatikan tentunya adalah bagaimana menciptakan harmonisasi jaringan sosial ini di tingkat masyarakat, pengurus, sesama kelompok sosial dan dengan pemerintah setempat, mulai dari desa,

kecamatan dan daerah. Untuk maksud tersebut maka perlu diperhatikan beberapa faktor pendukung maupun yang dapat saja menghambat harmonisasi jaringan sosial di daerah ini yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1). Faktor Pendukung.

Faktor pendukung yang dimaksud dalam kajian ini adalah berbagai hal yang dapat mendorong pada situasi sosial yang kondusif antara sesama kelompok sosial dan pemerintah setempat. Adapun faktor dimaksud a) Kekeluargaan. Kekeluargaan memegang peranan penting dalam upaya harmonisasi kelompok sosial. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa ikatan kekeluargaan lebih mendominasi daripada ikatan dalam kelompok organisasi sosial. Di wilayah ini menunjukkan bahwa walaupun terdapat perbedaan kepentingan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya, ikatan kekeluargaan masih menjadi prioritas utama yang harus dijaga dalam memperjuangkan aspirasi. Hasil kajian di lapangan menunjukkan bahwa interaksi sesama kelompok sosial tidak hanya melalui penyampaian aspirasi kepada pihak pemerintah atau instansi terkait lainnya, namun pada kesempatan lain masyarakat ataupun anggota kelompok sosial ternyata secara bersama-sama juga melaksanakan kegiatan sosial lainnya, misalnya pada acara-acara syukuran keluarga, tetangga atau sesama keluarga di wilayah lainnya. Kegiatan diluar agenda kelompok sosial inilah yang menjadi pengikat ataupun pendukung dalam hal harmonisasi jaringan sosial di daerah ini. b) Perhatian pemerintah.

Dalam hal penyampaian aspirasi dari kelompok sosial kepada pemerintah, hasil kajian lapangan menunjukkan bahwa walaupun belum semua aspirasi dapat dipenuhi, namun tingkat penerimaan untuk menampung aspirasi tersebut dapat diterima oleh masing-masing kelompok sosial. Disamping itu pula, pemerintah dalam hal aspirasi selalu menitikberatkan pada skala prioritas aspirasi yang dapat dipenuhi, juga dengan memperhatikan aspek pemerataan di masing-masing wilayah kelompok sosial. c) Pembinaan Kelompok sosial. Faktor pendukung ini merupakan faktor yang secara rutin dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Unit Kerja Kesbang Pol Kab. Boalemo.

Dalam kegiatan ini pemerintah secara rutin mengagendakan pertemuan dengan semua organisasi kelompok sosial di wilayah ini untuk mendiskusikan perkembangan pembangunan daerah, berbagai hal yang perlu ditindaklanjuti untuk menjalin kebersamaan di wilayah Boalemo. Disamping itu pula pertemuan dilakukan untuk menjaring berbagai ide baru yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran masing-masing kelompok sosial dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Boalemo. Sisi lain yang terbentuk dalam faktor ketiga ini adalah adanya pertemuan dan komunikasi rutin antara sesama kelompok sosial, sehingga konflik horizontal sesama kelompok sosial dapat diminimalisir bahkan ditiadakan.

## 2). Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang dimaksud dalam kajian ini adalah berbagai hal yang dapat membuka peluang pada konflik horizontal

sesama kelompok sosial dan konflik vertikal antara kelompok sosial dengan pemerintah setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor yang dapat menghambat harmonisasi jaringan sosial adalah Egosime Sektoral. Egosime sektoral yang dimaksud dalam kajian ini adalah ditekankan pada keinginan yang kuat dari masing-masing kelompok sosial untuk segera merealisasi aspirasi yang diutarakan. Hal ini jelas sangatlah sulit untuk diwujudkan, karena aspirasi yang diutarakan masih perlu untuk dilakukan kajian secara mendalam dan juga perlu penyesuaian dengan kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah dalam satu periode pembangunan. Egoisme sektoral juga nampak pada permintaan perhatian terhadap wilayah-wilayah tertentu maupun kegiatan kelompok-kelompok tertentu. Untuk menyikapi ini tentunya pemerintah sangatlah berhati-hati, prinsip yang dikedepankan adalah prinsip prioritas dan skala pemerataan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non fisik.

Dari hasil kajian lapangan di atas dapat dipahami bahwa pemetaan terhadap kelompok sosial dapat dibagi menjadi 6 (enam) bidang kegiatan kelompok sosial di wilayah Kabupaten Boalemo, dimana kegiatan tersebut diarahkan pada peningkatan pembangunan di wilayah Boalemo baik pembangunan secara fisik maupun non fisik. Sedangkan faktor pendukung yang dapat menjaga harmonisasi jaringan sosial meliputi faktor kekeluargaan,

faktor perhatian pemerintah dan faktor pembinaan terhadap kelompok sosial di wilayah ini.

#### **5.4 Model Harmonisasi jaringan sosial di Kabupaten Boalemo**

Berdasarkan rumusan masalah dan kondisi sosial obyektif hasil penelitian di lapangan, maka terdapat dua fokus penelitian yang dikaji, yang selanjutnya akan dijelaskan pada hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana mewujudkan harmonisasi sosial di Kab. Boalemo berdasarkan faktor pendukung dan penghambat.

Konsep harmonisasi dimaksudkan untuk menjaring dan menjaling hubungan yang seimbang, simetris dan horizontal dengan sesama kelompok jaringan sosial. Kelompok-kelompok sosial tentunya memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan kepentingan inilah yang menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam harmonisasi. Alasan yang mendasari hal tersebut adalah semakin besar perbedaan kepentingan antara kelompok sosial, maka akan semakin besar pula potensi gesekan atau konflik horizontal antara sesama kelompok sosial.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian tahun kedua diarahkan pada bagaimana mewujudkan harmonisasi jaringan sosial di Kabupaten Boalemo berdasarkan faktor pendukung maupun faktor yang menghambat. Untuk memperjelas dan mempertegas konsep dimaksud maka akan diuraikan lebih dulu faktor pendukung dan penghambat, yang selanjutnya diikuti dengan penjelasan hasil penelitian tentang bagaimana mewujudkan harmonisasi dimaksud pada obyek penelitian.

Konsep yang ingin dibangun dalam konteks ini adalah bagaimana faktor pendukung dapat digunakan untuk lebih meningkatkan harmonisasi sesama kelompok sosial di wilayah ini. Faktor pendukung yang dimaksud dalam kajian ini adalah berbagai hal yang dapat mendorong pada situasi sosial yang kondusif antara sesama kelompok sosial dan pemerintah setempat.

Adapun faktor dimaksud 1) Kekeluargaan. Kekeluargaan memegang peranan penting dalam upaya harmonisasi kelompok sosial. Hal ini didasarkan pada kondisi riil pada obyek penelitian yang menunjukkan bahwa ikatan kekeluargaan lebih mendominasi daripada ikatan dalam kelompok organisasi sosial. Jadi walaupun tergolong pada beberapa kelompok sosial yang berbeda, namun ikatan keluarga jauh lebih memiliki ikatan yang kuat.

Berbagai kelompok sosial di wilayah ini juga menunjukkan bahwa walaupun terdapat perbedaan kepentingan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya berdasarkan latar belakang maksud pembentukan masing-masing kelompok, namun demikian ikatan kekeluargaan masih menjadi prioritas utama yang harus dijaga dalam memperjuangkan aspirasi.

Hasil kajian di lapangan menunjukkan bahwa interaksi sesama kelompok sosial tidak hanya melalui penyampaian aspirasi kepada pihak pemerintah atau instansi terkait lainnya, namun pada kesempatan lain masyarakat ataupun anggota kelompok sosial ternyata secara bersama-sama juga melaksanakan kegiatan sosial lainnya, misalnya pada acara-acara syukuran keluarga, tetangga atau sesama keluarga di wilayah lainnya.

Kegiatan diluar agenda kelompok sosial inilah yang menjadi pengikat ataupun pendukung dalam hal harmonisasi jaringan sosial di daerah ini. Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan harmonisasi jaringan sosial di wilayah ini berdasarkan faktor kekeluargaan, maka terdapat beberapa hal yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian ini: yaitu perlu diadakan jadwal pertemuan yang dilakukan secara rutin oleh anggota masyarakat ataupun anggota kelompok sosial.

Dalam mengadakan pertemuan rutin dimaksud hendaknya tidak membahas kepentingan-kepentingann kelompok, namun lebih membahas tentang ikataan kekeluargaan yang selama ini telah terjalin. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui arisan keluarga, rukun suka ataupun rukun duka. Konsep arisan keluarga dimaksudkan untuk menjalin kebersamaan dengan sesama warga, ataupun dengan warga baru lain yang tinggal di masing-masing wilayah.

Konsep arisan juga akan banyak menepis perbedaan-perbedaan kepentingan, juga akan menguatkan tali persaudaraan dengan sesama warga. Hal ini terjadi oleh karena rutinitas pertemuan antara sesama anggota kelompok arisan. Jadi, perbedaan kelompok sosial akan dibungkus ataupun ditutupi dengan kelompok arisan keluarga. Konsep ini dimaksudkan untuk mempererat ikatan kekeluargaan diluar kepentingan-kepentingan kelompok sosial. konsep ini juga dimaksudkan untuk melepaskan berbagai kepentingan kekompok, perbedaan-perbedaan pendapat terhadap pembangunan maupun aspirasi kelompok lainnya.

Disamping faktor kekeluargaan sebagai pendukung terdapat pula faktor lain yaitu perhatian pemerintah. 2) Perhatian pemerintah. Dalam hal penyampaian

aspirasi dari kelompok sosial kepada pemerintah, hasil kajian lapangan menunjukkan bahwa walaupun belum semua aspirasi dapat dipenuhi, namun tingkat penerimaan untuk menampung aspirasi tersebut dapat diterima oleh masing-masing kelompok sosial.

Disamping itu pula, pemerintah dalam hal aspirasi selalu menitikberatkan pada skala prioritas aspirasi yang dapat dipenuhi, juga dengan memperhatikan aspek pemerataan di masing-masing wilayah kelompok sosial. Hasil kajian lapangan menunjukkan bahwa disamping perhatian pemerintah dalam bentuk pemenuhan aspirasi, maka perlu dikembangkan bentuk perhatian pemerintah yang lain, yaitu perhatian pemerintah mulai dari berbagai satuan kerja perangkat daerah di Kabuapten Boalemo.

Konsep yang ingin dibangun dalam konteks ini adalah bagaimana bisa terjalin kebersamaan antara kelompok sosial yang satu dengan kelompok sosial yang lain dengan pemerintah, baik dari pemerintah desa, kecamatan dan daerah, beserta dinas/instansi lainnya. Untuk dapat melaksanakan maksud peran tersebut maka perlu adanya kebijakan dari pemerintah daerah untuk dapat menaungi atau mewadahi harmonisasi di berbagai wilayah desa/kecamatan di Kab. Boalemo.

Bentuk yang dapat digunakan misalnya desa binaan atau wilayah kecamatan binaan baik itu oleh kecamatan, dinas instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Distribusi wilayah pada semua instansi menjadi wilayah binaan menjadi salah satu pintu masuk untuk menjadikan perhatian pemerintah sebagai pendorong untuk membentuk dan terus menjaga harmonisasi sosial di wilayah ini. 3) Pembinaan Kelompok sosial. Faktor pendukung ini merupakan faktor yang secara rutin

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Unit Kerja Kesbang Pol Kab. Boalemo.

Dalam kegiatan ini pemerintah secara rutin mengagendakan pertemuan dengan semua organisasi kelompok sosial di wilayah ini untuk mendiskusikan perkembangan pembangunan daerah, berbagai hal yang perlu ditindaklanjuti untuk menjalin kebersamaan di wilayah Boalemo. Disamping itu pula pertemuan dilakukan untuk menjaring berbagai ide baru yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran masing-masing kelompok sosial dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Boalemo. Sisi lain yang terbentuk dalam faktor ketiga ini adalah adanya pertemuan dan komunikasi rutin antara sesama kelompok sosial, sehingga konflik horizontal sesama kelompok sosial dapat diminimalisir bahkan ditiadakan.

Kondisi ril yang telah dijelaskan sehubungan dengan faktor pendukung melalui pembinaan kelompok sosial sesungguhnya belum maksimal dijalankan, hal ini disebabkan peran pemerintah masih terbatas melalui Badan Kesbang Pol Kabupaten Boalemo. Oleh karena itu perlu ditindaklanjuti atau diikuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, artinya bahwa untuk menjamin harmonisasi jaringan sosial maka sangat dibutuhkan peran maksimal dari pemerintah melalui berbagai Dinas/Instansi ataupun satuan perangkat kerja daerah.

Maksud pada penjelasan ini memiliki kaitan yang erat dengan faktor pendukung kedua dalam hasil penelitian ini, yang lebih menegaskan pada perlunya peran maksimal dari pemerintah melalui berbagai instansi, mulai dari kecamatan sampai pada organisasi tingkat daerah.

Kondisi dimaksud dengan tidak bermaksud mengabaikan peran dari pihak lainnya diluar pemerintah yang selama ini juga telah diupayakan tetap berjalan. Hal penting yang perlu diupayakan pula adalah kebersamaan antara masyarakat, kelompok sosial, pemerintah dan pihak lainnya sangatlah dibutuhkan dalam rangka merencanakan, melaksanakan dan terus melakukan evaluasi perbaikan berbagai program harmonisasi di wilayah ini.

## 2). Faktor Penghambat

Faktor penghambat sesungguhnya tidak selalu menjadi penghalang dari keberhasilan sebuah konsep, dengan catatan sejauhmana kemampuan kita dalam mempelajari dan menggunakan faktor penghambat tersebut menjadi faktor pendukung yang dapat memberikan kontribusi positif dalam konsep harmonisasi. Adapun faktor penghambat yang dimaksud dalam kajian ini adalah berbagai hal yang dapat membuka peluang pada konflik horizontal sesama kelompok sosial dan konflik vertikal antara kelompok sosial dengan pemerintah setempat.

Konflik horizontal tentulah kondisi yang sama sekali tidak kita inginkan terjadi. Oleh karena itu perlu difikirkan faktor lainnya yang dapat menghalau atau bahkan mengalihkan untuk tidak terjadinya konflik horizontal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor yang dapat menghambat harmonisasi jaringan sosial adalah Egosime Sektoral. Egosisme sektoral yang dimaksud dalam kajian ini adalah ditekankan pada keinginan yang kuat dari masing-masing kelompok sosial untuk segera merealisasikan aspirasi yang disuarakan.

Hal ini jelas sangatlah sulit untuk diwujudkan, karena aspirasi yang diusarakan masih perlu untuk dilakukan kajian secara mendalam dan juga perlu

penyesuaian dengan kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah dalam satu periode pembangunan. Egoisme sektoral juga nampak pada permintaan perhatian terhadap wilayah-wilayah tertentu maupun kegiatan kelompok-kelompok tertentu. Untuk menyikapi ini tentunya pemerintah sangatlah berhati-hati, prinsip yang dikedepankan adalah prinsip prioritas dan skala pemerataan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non fisik.

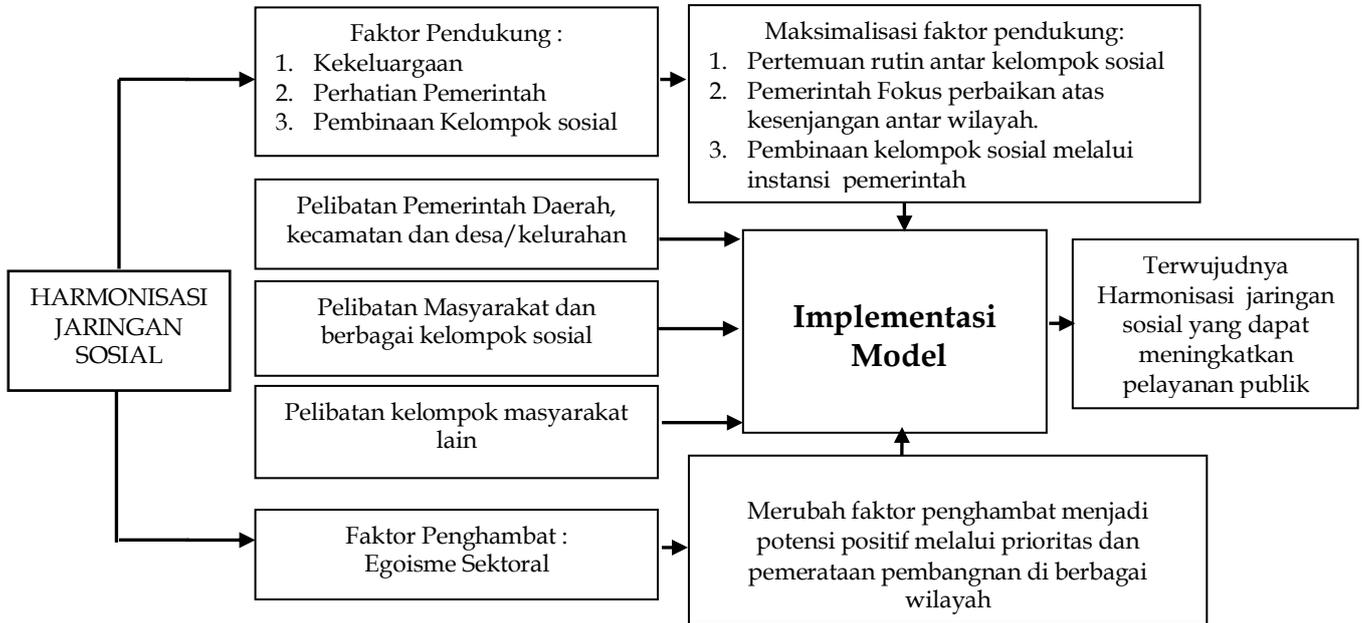
Namun demikian egoisme sektoral yang muncul dari dalam kelompok ini sesungguhnya tidak akan menjadi faktor penghambat apabila terdapat situasi yang dapat merubah kecenderungan tersebut menjadi sesuatu yang sifatnya produktif dan positif. Kondisi tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa langkah sebagai berikut: 1) Mempelajari berbagai faktor yang menyebabkan adanya kecenderungan egoisme sektoral, 2) Memberikan pemahaman kepada kelompok sosial pemilik kepentingan untuk sama-sama terlibat dalam pembangunan yang dikelola secara transparan sehingga membuka pemahaman akan keterbatasan sumber daya, yang pada akhirnya bersedia menerima skala prioritas pembangunan yang ditetapkan pemerintah di berbagai wilayah kabupaten Boalemo. 3) Melakukan pertemuan rutin ataupun komunikasi yang intens dengan masyarakat kelompok sosial dengan tujuan membahas berbagai perkembangan dan isu yang muncul baik ekonomi, sosial dan budaya, dan berbagai alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi. Dengan melakukan beberapa kegiatan tersebut maka faktor egoisme sektoral dapat dikurangi, bahkan faktor ini jika dikelola dengan baik akan dapat menjadi faktor yang dapat mendukung konsep dan implementasi harmonisasi sosial di wilayah ini.

Namun demikian disisi lain peran pemerintah untuk harmonisasi jaringan sosial di wilayah ini sebaiknya dilakukan dengan pengalokasian sumber daya pembangunan di berbagai wilayah, utamanya diwilayah-wilayah terpencil, dalam rangka program pemerataan pembangunan. Hal ini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kesenjangan pembangunan, baik secara ekonomi, pendidikan dan kesehatan maupun program pembangunan lainnya bisa menjadi penyebab adanya egoisme sektoral di berbagai kelompok.

Berdasarkan hasil penelitian tahun pertama dan hasil penelitian tahun kedua pada fokus masalah pertama, maka model harmonisasi jaringan sosial yang dihasilkan akan melibatkan pemerintah, masyarakat kelompok sosial dan organisasi lain yang memiliki keterkaitan dengan konsep harmonisasi.

Keterlibatan ketiga bagian tersebut dalam implementasi model harmonisasi jaringan sosial akan memaksimalkan hasil yang akan dicapai. Adapun model harmonisasi jaringan sosial dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1 : Model Harmonisasi Jaringan Sosial Sebagai Faktor Penentu Layanan Publik



## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1). Terdapat beberapa faktor yang mendukung maupun menghambat harmonisasi jaringan sosial di Kabupaten Boalemo. Faktor pendukung meliputi faktor kekeluargaan, faktor perhatian pemerintah dan faktor pembinaan kelompok sosial. Sedangkan faktor penghambat lebih kuat muncul dari aspek egoisme sektoral, khususnya dalam menyuarakan aspirasi dalam konteks pembangunan di berbagai bidang. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai motif adanya kelompok sosial diantaranya meliputi organisasi kepemudaan, keagamaan, kesehatan, pendidikan dan aspek lainnya. Jaringan sosial di Kabupaten Boalemo dibentuk di beberapa wilayah kecamatan berdasarkan adanya kepentingan dan aspirasi yang disuarakan dari wilayah-wilayah tersebut, baik untuk menyuarakan kepentingan ekonomi, keagamaan politik, sosial kemasyarakatan, keagamaan, kesehatan, seni dan sosial budaya. Interaksi jaringan sosial di Boalemo terbentuk melalui sosial kontrol yang dilakukan dalam pertemuan rutin dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya untuk melakukan diskusi berbagai masalah pembangunan di wilayah Kab. Boalemo.
- 2). Berdasarkan faktor pendukung maupun penghambat harmonisasi jaringan sosial, maka hasil kajian lapangan telah menghasilkan sebuah model yang dapat dijadikan dasar untuk implementasi dalam rangka mewujudkan secara nyata harmonisasi jaringan sosial di Kabupaten Boalemo untuk dapat

meningkatkan pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik di daerah ini.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dijelaskan di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam membangun konsep harmonisasi jaringan sosial masih perlu dipelajari secara mendalam berbagai faktor lain yang bisa saja muncul sebagai pendukung maupun penghambat. Hal tersebut perlu terus dilakukan seiring dengan perjalanan waktu yang dapat merubah kondisi perubahan sosial masyarakat yang dapat terjadi setiap waktu. Dengan melakukan hal tersebut maka harmonisasi jaringan sosial di daerah dapat terus berlangsung pada waktu-waktu mendatang.
2. Berdasarkan model harmonisasi yang telah disusun, maka hal tersebut dapat dilaksanakan di berbagai wilayah di Kab Boalemo, mulai dari tingkat kelurahan/desa, kecamatan dan daerah. Selanjutnya implementasi atas model harmonisasi jaringan sosial tersebut sedapat mungkin terus disesuaikan dengan perubahan kondisi sosial yang dapat saja terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi, 2005, *Pengantar Sosiologi*, Ghalia Indonesia
- Faisal Sanafiah, 2005, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kencana Inu, 1999, *Ilmu Administrasi Publik*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ndraha Taliziduhu, 2003, *Kybernology 1 (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta, Rineka Cipta
- , 2003, *Kybernology 2 (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Rineka Cipta
- Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2006, *Manajemen Pelayanan*, Jakarta, Pustaka Pelajar
- Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press
- Shodiqin Nursa, 2007, *Boelemo Bertasbih, Model Pembangunan Berbasis Masyarakat Madani*, Forum Media Utama
- Widodo Joko, 2001, *Good Governance*, Insan Cendekia, Surabaya

## **INSTRUMEN PENELITIAN**

Dalam melaksanakan kajian di lapangan maka perlu disusun pedoman wawancara di lapangan yang disusun berdasarkan rumusan masalah. Pedoman wawancara digunakan sebagai alat bantu untuk memandu tim peneliti di lapangan, yang selanjutnya wawancara berkembang secara natural sesuai dengan kondisi yang disampaikan oleh informan.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dijelaskan di atas, maka kajian ini akan difokuskan pada beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

- 1). Bagaimana kondisi interaksi jaringan sosial masyarakat di Kabupaten Boalemo?
- 2). Faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung maupun menghambat terbangunnya jaringan sosial yang kondusif di Kabupaten Boalemo?
- 3). Bagaimanakah model harmonisasi jaringan sosial di Kabupaten Boalemo?

### **2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1). Melaksanakan kajian ilmiah yang mendalam terhadap interaksi kelompok sosial beserta jaringannya di Kabupaten Boalemo.
- 2). Melaksanakan kajian ilmiah yang mendalam terhadap berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat terbangunnya jaringan sosial yang kondusif di Kabupaten Boalemo.

- 3). Melaksanakan kajian ilmiah yang mendalam terhadap model harmonisasi jaringan sosial dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Boalemo

**3. Pedoman Materi Wawancara fokus penelitian meliputi :**

- 1) Kajian komprehensif kelompok social dan jaringan social di Kabupaten Boalemo
- 2) Kajian pemetaan seluruh kelompok social dan jaringan social di Kabupaten Boalemo
- 3) Kajian terhadap factor pendukung dan penghambat Harmonisasi jaringan social di Kabupaten Boalemo
- 4) Model harmonisasi jaringan social di Kabupaten Boalemo

## DOKUMENTASI LAPANGAN



Salah satu kegiatan diskusi group di Instansi Pemerintah Kabupaten Boalemo



Salah satu kegiatan diskusi group di Instansi Pemerintah Kabupaten Boalemo



Salah satu kegiatan wawancara mendalam dengan informan kunci  
Di Kabupaten Boalemo



Salah satu kegiatan wawancara mendalam dengan informan kunci  
Di Kabupaten Boalemo



Wawancara mendalam dengan informan kunci



Salah satu kegiatan diskusi group di Instansi Pemerintah Kabupaten Boalemo



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
NOMOR : 13/UN47/2014**

Tentang

**PENETAPAN PENELITI DAN JUDUL PENELITIAN DESENTRALISASI  
ATAS BIAYA DIKTI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
TAHUN PELAKSANAAN 2014**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

- Menimbang** :
- a. bahwa kegiatan penelitian adalah salah satu unsur tridharma Perguruan Tinggi yang harus dijaga dan ditingkatkan mutunya demi penguatan kelembagaan Universitas Negeri Gorontalo;
  - b. bahwa penguatan kelembagaan merupakan salah satu hal penting dalam menjamin peningkatan mutu;
  - c. bahwa untuk kepentingan pengembangan mutu dan kualitas penelitian, maka perlu dilakukan upaya pengembangan minat meneliti bagi dosen di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo;
  - d. bahwa berkenaan dengan diktum "c" di atas, maka ditetapkan pemenang atas Penelitian Desentralisasi tahun pelaksanaan 2014;
  - e. Penetapan dosen peneliti yang dibiayai mutlak berdasarkan atas hasil penilaian oleh Ditlitabmas Dikti Kemdikbud;
  - f. bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan penelitian dimaksud.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 3. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  - 4. PP No, 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 17 tahun 2010
  - 5. Kepres No. 54 tahun 2004 tentang perubahan status IKIP Gorontalo Menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 110/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo;
  - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Negeri Gorontalo;
  - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo;
  - 10. Kepmenkeu No. 131/KMK.05/2009 tentang penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

11. Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo Nomor :  
023-04.415196/2013 tanggal 05 Desember 2013.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Penetapan peneliti dan judul penelitian desentralisasi Dikti di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo tahun pelaksanaan 2014 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Peneliti bertanggung jawab penuh secara teknis, sistematika dan administratif dengan mengacu pada Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PPM Edisi IX yang mengatur secara rinci pelaksanaan penelitian atas biaya Dikti serta mematuhi segala bentuk kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Penelitian.
- Ketiga : Peneliti dalam pelaksanaan penelitian wajib melaporkan kemajuan hasil penelitian, laporan penggunaan keuangan serta memasukan Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada Lembaga Penelitian dan SIM-LITABMAS.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya serta diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

DITETAPKAN DI : GORONTALO  
PADA TANGGAL : 15 Januari 2014

REKTOR,



Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd  
NIP. 196006031986031003

Tembusan Yth. :

1. Para Pembantu Rektor Universitas Negeri Gorontalo
2. Para Dekan di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo
3. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Gorontalo
4. Kepala KPPN Gorontalo
5. Bendahara Pengeluaran Universitas Negeri Gorontalo

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo  
Nomor : 13/UN47/2014  
Tanggal : 15 Januari 2014  
Tentang : Penetapan Peneliti dan Judul Penelitian Desentralisasi Dikti di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo tahun pelaksanaan 2014

---

No	Peneliti	Judul Penelitian	Skim	Biaya
1	Dr. Ismet Sulila, SE, M.Si Drs. Rusli Isa, M.Si Sainudin Latare, S.Pd, M.Si	Harmonisasi Jaringan Sosial Sebagai Faktor Pendukung dan Penghambat Pelayanan Publik di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo	Hibah Bersaing	Rp 40,000,000

**REKTOR,**  
**Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd**  
**NIP. 196006031986031003**